BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 27 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Karanganyar
Di-
KARANGANYAR.

SURAT EDARAN
NOMOR : 050 / 875 .22 / 2023
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

Selanjutnya dalam rangka penyelarasan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024-2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah **"Meningkatkan Daya Saing Daerah"**

B. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

3. Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatnya wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

C. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

1. Peningkatan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan :
   a. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pemenuhan universal akses, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah serta pembangunan kawasan strategis pedesaan.
   b. Meningkatkan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM bidang sosial
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan, dilaksanakan dengan :
   a. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, kesehatan, budaya literasi, dan mendorong pemenuhan SPM bidang pendidikan dan kesehatan.
   b. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui peningkatan pemberdayaan perempuan, peningkatan anggaran responsif gender, penanganan kekerasan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak
   c. Meningkatkan, produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Karanganyar dan kawasan industri sekitar Karanganyar, peningkatan penempatan kerja, peningkatan penyelesaian hubungan industri.
   d. Meningkatkan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
3. Peningkatan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal, dilaksanakan dengan : Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pembangunan dan perawatan jalan serta penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah
4. Peningkatan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dilaksanakan dengan :
   a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan,

meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah.

b. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.

c. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatkan kerukunan antar umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan kemanan dan ketertiban umum

5. Peningkatan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dilaksanakan dengan : Meningkatkan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana dan peningkatan kualitas lingkungan.

D. Arah Kebijakan Daerah dan Prioritas Daerah Tahun 2024-2026

1. Tahun Pertama (2024)

Arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e goverment) serta penguatan SDM dan daya saing daerah. Prioritas pada tahun 2024 adalah :

a. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :

1) Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN, implementasi Satu Data dan Electronic Government (E-Gov) dan keamanan informasi daerah;

2) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dan Optimalisasi pengelolaan aset daerah;

3) Peningkatan pengelolaan arsip digital;

4) Peningkatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;

5) Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;

6) Peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan partisipasi politik;

7) Peningkatan implementasi inovasi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

b. Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana, difokuskan pada :

1) Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Optimalisasi partisipasi politik di kalangan masyarakat terutama untuk pemilih pemula;
3) Pengurangan resiko bencana melalui upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

c. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :
1) Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2) Pengendalian penduduk melalui peningkatkan pemahaman masyarakat untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat ber KB dan keluarga sejahtera;
3) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah inklusi;
4) Pengembangan budaya literasi masyarakat;
5) Pemberdayaan wirausaha muda dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6) Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;
7) Peningkatan kualitas SDM dalam pelestarian budaya dan cagar budaya;
8) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak

d. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem difokuskan pada :
1) Peningkatan kualitas produksi pertanian dititikberatkan pada kualitas sarana dan prasarana pertanian, pengembangan agro industri;
2) Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
3) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan branding;
4) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;

5) Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
6) Optimalisasi penanganan kemiskinan melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
7) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan diversifikasi produk pangan;
8) Peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja.

e. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
1) Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dan distribusi melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan;
2) Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman melalui pemenuhan penanganan rumah tidak layak huni bagi korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
3) Peningkatan akses air minum pada masyarakat dan peningkatan akses sanitasi layak;
4) Pengelolaan Sumber daya air untuk mendukung penanganan banjir dan peningkatan kualitas sistem irigasi.

2. Tahun Kedua (2025)

Arah kebijakan tahun kedua (2025) adalah Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan. Prioritas pada tahun 2025 adalah :

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, difokuskan pada :
1) Peningkatan kualitas produktivitas pertanian dititikberatkan pada peningkatan lahan pertanian berkelanjutan, pengembangan agro industri;
2) Penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan kolaborasi dengan e commerce;
3) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
4) Penguatan industri kecil menengah melalui pengembangan diversifikasi produk sentra/kluster industri,

pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;

5) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal;
6) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta;
7) Optimalisasi potensi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.

b. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
   1) Pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
   2) Pemerataan pembangunan PSU permukiman, penanganan kawasan kumuh dan penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan;
   3) Perluasan akses air minum pada masyarakat dan pemerataan akses sanitasi layak untuk mencapai SPM;
   4) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan sistem irigasi berkualitas dan penanganan banjir.

c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :
   1) Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca;
   2) Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
   3) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)

d. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing, difokuskan pada :
   1) Pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, penurunan stunting, mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan kampung sehat;
   2) Peningkatan pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
   3) Pemantapan kualitas pengelolaan pendidikan untuk mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal

bidang pendidikan, dan meminimalkan anak usia sekolah yang tidak sekolah serta pengembangan sekolah inklusi;

4) Penguatan budaya literasi masyarakat di era digital;
5) Peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran;
6) Peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ditingkat regional, nasional dan internasional;
7) Peningkatan peran SDM dalam pengembangan dan pemasaran budaya serta pelestarian cagar budaya;
8) Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

e. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada :
   1) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan kabupaten pintar (*smart city*);
   2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
   3) Pengembangan pengelolaan arsip digital;
   4) Penguatan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
   5) Penguatan dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
   6) Optimalisasi upaya peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela Negara serta peningkatan pendidikan politik masyarakat;
   7) Pengembangan iklim inovasi dan Penguatan implementasi inovasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

f. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada :
   1) Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM);
   2) Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan daerah;
   3) Peningkatan pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
   4) Pengembangan kerjasama antar desa.

3. Tahun Ketiga (2026)

Arah kebijakan tahun ketiga (2026) adalah Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing didukung pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prioritas pada tahun 2026 adalah :

a. Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya, difokuskan pada :
   1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan, peningkatan indikator keluarga sehat, pengurangan stunting, dan mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
   2) Pengendalian penduduk melalui penguatan calon pengantin untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
   3) Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam rangka perwujudan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah serta perwujudan sekolah vokasi;
   4) Peningkatan budaya literasi masyarakat;
   5) Peningkatan peran pemuda disegala aspek pembangunan dibidang ekonomi sebagai wirausaha muda, bidang sosial dan budaya;
   6) Peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi;
   7) Peningkatan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan pelestarian cagar budaya;
   8) Perwujudan Kabupaten layak anak dan responsive gender.
b. Pemantapan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada :
   1) Pemantapan infrastruktur untuk mendukung konektivitas melalui peningkatan kemantapan jalan, kualitas pelayanan angkutan yang menghubungkan antar wilayah;
   2) Penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu, korban bencana dan korban program pembangunan, penguatan kualitas PSU permukiman dan pencegahan kawasan kumuh;
   3) Peningkatan akses sanitasi layak dan akses air minum pada masyarakat;
   4) Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk mendukung produktivitas tanaman pangan dan penanganan banjir.
c. Pemantapan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada :
   1) Optimalisasi Penurunan emisi gas rumah kaca;
   2) Peningkatan pengawasan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
   3) Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST dan pengurangan sampah dengan sistem 3 R.

d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, difokuskan pada :
   1) Peningkatan kualitas produksi pertanian dalam arti luas yang dititikberatkan pada peningkatan produktivitas berkelanjutan dan pengembangan agro industri;
   2) Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikasi dan peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan melalui kolaborasi dengan e commerce;
   3) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan yang menunjang ekspor dan perlindungan konsumen;
   4) Pengembangan industri kecil menengah dengan penguatan sentra/kluster industri, pengembangan ekonomi kreatif dan perluasan pasar berbasis digital;
   5) Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
   6) Optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem melalui sinergi dan kerjasama intervensi antara pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak swasta;
   7) Optimalisasi cadangan pangan masyarakat melalui peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;
   8) Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan pasar.
e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah berbasis digital, difokuskan pada :
   1) Peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui perwujudan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas dan kompetensi ASN, kualitas satu data, keamanan informasi daerah dan smart city (kabupaten pintar);
   2) Optimalisasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah;
   3) Pemantapan pengelolaan arsip digital;
   4) Pemantapan kualitas sektor pelayanan publik dan kewilayahan;
   5) Pemantapan kualitas dan perluasan pengawasan pembangunan untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyalahgunaan anggaran pembangunan;
   6) Pemantapan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara serta penguatan pendidikan politik masyarakat;
   7) Pemantapan pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

f. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan strategis pedesaan dan kewilayahan, difokuskan pada :
   1) Peningkatan desa kategori mandiri;
   2) Peningkatan BUMDes menjadi BUMDesma;
   3) Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan;
   4) Peningkatan pembangunan desa melalui pendekatan kawasan terintegrasi.

E. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 diukur dengan tercapainya target indikator kinerja yang diproyeksikan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah			Indeks	3,750	3,800	3,850	3,850
		Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,89	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,20	77,40	77,68	77,68
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	5,0	5,50	5,50
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	67	70	70
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105	102	98	98

F. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun secara simultan (bersamaan) dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan April Tahun 2023

4. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat :

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat :

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian pada Bab II)
2. Isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
2. *Cascading* kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui

Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku ursaun pemerintahan daerah

BAB VIII PENUTUP

5. Rancangan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dikumpulkan melalui Mitra Bidang BAPERLITBANG pada Minggu Pertama Bulan Maret 2023.

G. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2024, serta prakiraan maju anggaran tahun 2025
2. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan
3. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

   BAB I PENDAHULUAN

   Memuat gambaran umum penyusunan Renja PD yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

   BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

   - Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2022 yang dilengkapi dengan visual hasilnya
   - Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci
   - Prestasi yang di capai pada Tahun 2022
   - Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi
   - Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah
- Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Tantangan dan peluang Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan
- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam dan hasil reses / aspirasi DPRD)

BAB V PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M., M.H.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Karanganyar;
4. Para Asisten Sekda Kab. Karanganyar.